

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di wilayah Asia Tenggara perdagangan opium yang merupakan tempat penghasil obat-obatan terbesar dikenal dengan sebutan segitiga emas atau *golden triangle*. berada di perbatasan Laos, Myanmar, Thailand dengan wilayah luas 950.00 km². Disebut sebagai segitiga emas karena Thailand mempunyai wilayah yang strategis untuk tempat transitnya obat-obatan terlarang dan penghasil opium, sementara Myanmar dan Laos merupakan dua negara pelaku produsen yang menghasilkan opium dan memproduksi bahan baku opium dari getah kering bunga candu *papaver somniferum*, bahkan segitiga emas mampu menghasilkan jumlah yang fantastis dari obat-obatan jenis heroin sebesar 160 miliar dollar AS tiap tahun.



Gambar 1. Golden Triangle

Sumber : Detik.com, 2018

Meningkatnya produksi opium di wilayah 3 negara penghasil, terutama Thailand pada tahun 2018 dengan kasus opium 197.787, tahun 2020 247.796, tahun 2021 211.372 yang mempunyai andil besar menjadikan kartelnya memproduksi jenis obat terlarang lainnya seperti metamfetamin, hal ini dilihat dari masyarakat

Asia Tenggara yang tinggi akan minat (Nathan, 2019). Dengan adanya lahan obat-obatan terlarang seperti opium menjadikan segitiga emas rute sebagai penghasil dan peredaran narkoba terbesar di dunia, masyarakat Asia Tenggara khususnya di kawasan segitiga emas yang mengkonsumsi opium menjadikan masyarakat setempat menanam tanaman opium secara massal di beberapa wilayah negara dan didukung dari topografi wilayah segitiga emas yang terletak di pegunungan sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan subur.

Table 1. Data Opium

No.	Jenis Narkoba	Negara	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Opium	Laos	103.76 kg	2.577 kg	60.301 kg
2.		Myanmar	2.289 kg	1.760 kg	3.882 kg
3.		Thailand	69 kg	95 kg	123 kg

Sumber : ASEAN, 2023

Indonesia memiliki ciri khas geografis sebagai negara kepulauan dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau sehingga tercermin potensi besar sebagai negara maritim. Ditandai dengan jalur pelayaran dan perdagangan Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia mengamati potensi sebagai salah satu bentuk aset strategis negara, lalu sesuai dengan konstitusi Indonesia dan memiliki hak kedaulatan atas laut dan sumber daya alam laut di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memanfaatkan poros maritim sebagai potensi ekonomi yang besar termasuk dalam sektor perikanan, perkapalan, dalam peningkatan peran dan pengaruh Indonesia ke dalam forum internasional sehingga

memiliki peran yang begitu penting dalam hubungan internasional, baik dalam diplomasi maupun perdagangan internasional. Namun hal tersebut tentu mempunyai tantangan yang besar bagi Indonesia sendiri sebagaimana Indonesia merupakan negara poros maritim dunia yang harus melakukan pengamanan dan pertahanan nasional di wilayah perairan Indonesia dari ancaman pencurian kapal, penyelundupan narkoba, pencurian ikan dan kegiatan terorisme lainnya. Tujuan dibentuknya keamanan maritim untuk menjaga stabilitas negara, Indonesia dapat melakukan integrasi regional dengan kawasan Asia Tenggara dan konektivitas (Chaerul, 2023).

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah maritim yang luas dan perlu adanya keamanan maka tidak sedikit pula terjadinya aksi-aksi penyelundupan gelap narkoba di perairan Indonesia, peredaran narkoba sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang besar bahkan para pengguna masih terus melakukan aksi ilegalnya. Kawasan segitiga emas sebagaimana kita ketahui menjadi ancaman bagi Indonesia sendiri, melihat letak posisi Asia Tenggara yang strategis menjadikan jalur perdagangan narkoba berjalan dengan lancar ditambah lagi dengan Indonesia yang berpotensi besar dan nilai uang yang fantastis diterima. Ancaman yang berasal dari segitiga emas berdampak pada kerugian negara baik dari segi keamanan, sumber daya manusia dan ancaman kedaulatan di suatu negara, kedaulatan teritorial negara, dan masih lemahnya struktur pemerintahan di negara tersebut sehingga para sindikat internasional memanfaatkan momentum tersebut (Amirah, 2022).



Gambar 2. Perbatasan Batam-Singapura-Malaysia

Sumber : CNN.com, 2022

Kota Batam dikenal dengan keunggulannya secara geografis yaitu berada di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia, bersebelahan dengan Singapura dan Malaysia, lalu pada tahun 1969 pemerintah pusat fokus menetapkan *free trade zone* tentang perdagangan dan pelabuhan bebas yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan (BP) khusus pemerintah, beberapa hambatan FTZ dihapuskan diantaranya tarif dan kuota untuk mempermudah birokrasi dan bertujuan untuk menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di kawasan FTZ. Dengan menerapkan FTZ diharapkan adanya kenaikan nilai ekonomis di suatu wilayah baik dari kegiatan ekspor-impor, investasi yang dapat memberikan dampak *multiplier effect* untuk Kota Batam dan Indonesia (Budiman, 2019).

Tabel 2. Tabel Data Narkoba Jenis Metamfetamin

No.	Jenis Narkoba	Negara	2018	2019	2020
1.	Metamfetamin	Laos	85 kg	174 kg	135 kg
2.		Myanmar	64 kg	144 kg	150 kg
3.		Thailand	18.84 kg	25 kg	39 kg

Sumber : ASEAN Work Plan On Securing Communities Against Illicit

Drugs 2016-2025, 2017

Meskipun penerapan free trade zone di implementasikan tidak menutupi kemungkinan untuk terjadinya perdagangan bebas narkoba yang dilakukan sindikat internasional baik di darat ataupun di laut. Berdasarkan laporan BNN pada 6 Juni, terjadinya peningkatan peredaran dan produksi narkoba terus meningkat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sementara pertumbuhan ekonomi yang eksklusif akan memberikan dampak positif bagi keterbukaan lapangan kerja dan akses peluang ekonomi. Dengan eksistensi *golden triangle* atau segitiga emas yang berada di utara Myanmar, Thailand dan Laos mendorong perkembangan peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara. Laporan data dari UNODC menunjukkan pada tahun 2021 peningkatan pengguna metamfetamin meningkat sekitar 1,008 miliar pil sabu yang disita oleh karena itu angka tersebut melambung tinggi dari 10 tahun sebelumnya (Sihombing, 223).



Gambar 3. Kapal Sunrise Glory
Sumber : Liputan 6.com, 2018

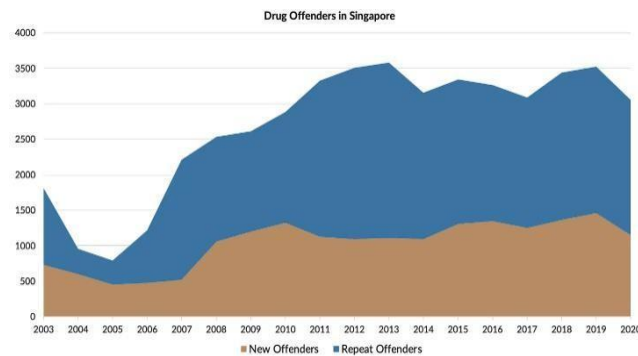
Tahun 2018 tepatnya di Selat Philips, Batam, Indonesia terjadi penangkapan kapal Sunrise Glory berbendera Singapura diduga membawa sabu seberat 1 ton dengan 41 karung beras dengan nominal yang mencapai 1,5 triliun. Penangkapan

kapal Sunrise Glory dilakukan oleh KRI-Sigurot 864 atau kapal Tentara Nasional Indonesia yang pada saat itu sedang bertugas di sekitar wilayah perairan. KRI mendeteksi kapal tersebut melintasi batas yang tidak harusnya dilewati. Atas kecurigaan tersebut maka KRI melakukan prosedur pengejaran, penangkapan dan penyidikan serta pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para ABK ialah warga negara Taiwan, hasil dari pengecekan dokumen yang dibawa dinyatakan palsu sebab tidak adanya dokumen-dokumen asli yang dibawa hanya sekedar fotocopy. Bahkan pengecekan selanjutnya diketahui izin laju kapal tidak ada sama sekali sehingga hal ini janggal dan tentunya masih ada kepastian lain (Liputan 6.com, 2018).

Implementasi perjanjian internasional merujuk pada asas kesamaan derajat, saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, aspek pertahanan merupakan aspek dasar yang penting dalam menjamin kehidupan negara. Hal tersebut menggambarkan salah satu bentuk untuk mempertahankan diri pada ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri dalam mempertahankan kedaulatannya. Maka pemerintah mengambil sikap komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di bidang pertahanan sebagai langkah merealisasikan tujuan negara (Ermawan, 2022).

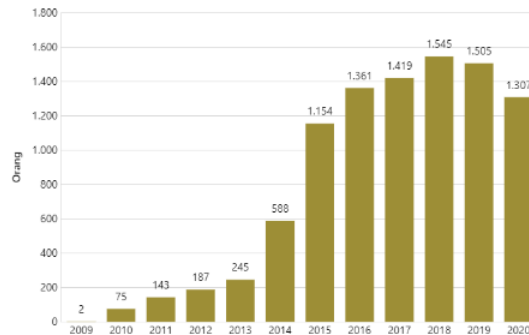
Dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pertahanan (Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of Republic Singapore on Defence Cooperation) pada 27 April 2007 di Bali, Indonesia. Perjanjian tersebut berisikan tentang perundingan kerjasama bilateral terkait isu keamanan, pertukaran informasi dalam penanganan terorisme,

peningkatan dalam bidang ilmu teknologi dengan saling memberikan informasi, kunjungan personal, dan sebagainya. Pertemuan Indonesia-Singapura sebagai bentuk langkah terhadap *zero tolerance* terhadap narkoba yang melibatkan kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan CNB (Central Narcotic Bureau) Singapura, alasan kuat kerjasama yang dijalin dikarenakan maraknya narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia dan wilayah Singapura (Kompas.com, 2022).



Gambar 4. Kenaikan Penyalahgunaan Narkoba di Singapura
Sumber : Singapore Samizdat.com, 2021

Dari data di atas bahwa narkoba kerap terjadi mengalami peningkatan bagi pengguna baru ataupun pengguna lama dengan rata-rata usia 30 tahun ke bawah dan pada grafik tersebut menunjukkan tingkat urgensi penyalahgunaan narkoba di Singapura memasuki masalah yang serius, sehingga diperlukannya tenaga-tenaga ahli untuk bekerja sama memberantas pergerakan narkoba.



Gambar 5. Permintaan Narkoba yang Meningkat

Sumber : Bbc.com, 2018

Jumlah akumulasi dari tahun 2009-2019 menunjukkan grafis yang terus meningkat dengan kasus tercatat 6.128 kasus hal ini tidak jauh dari jumlah penduduk yang terus meningkat dan letak negara yang cukup strategis dengan permintaan narkoba yang terus meningkat menjadikan Indonesia sasaran empuk bagi pengedar obat-obatan (Bbc.com, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengangkat “Bagaimana Upaya Indonesia dalam Penanggulangan Obat-obatan terlarang di Kapal Sunrise Glory”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih terkait fenomena yang diangkat

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola apa saja yang menjadi tindakan bagi Indonesia dan Singapura atas kasus penyelundupan sehingga prosedur-prosedur yang dilakukan oleh kedua negara dapat mengurangi masuknya narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum dapat dikembangkan nantinya oleh peneliti yang lain agar terbarukan sebab jarang sekali para penulis skripsi meneliti permasalahan di kota Batam salah satunya terkait tentang narkoba yang kerap terjadi di lintas jalur laut melalui perairan selat Philips yang biasanya kapal melintas berasal dari luar negeri.

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi kerjasama antara Indonesia-Singapura dalam melindungi wilayah maritim dari sindikat internasional dalam penyelundupan narkoba.

1.4.2 Manfaat Sosial

Dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat bahwa narkoba masih ada dan harus diperangi bersama-sama maka diperlukannya kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang agar negara dapat melindungi kawasannya dari narkoba, serta pengawasan yang ketat agar meminimalisir masuknya jaringan narkoba ke Indonesia.

1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai acuan referensi bagi mahasiswa yang meneliti terkait kerjasama Indonesia-Singapura dalam kasus Sunrise Glory tahun 2018.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, peneliti akan menjabarkan tabel dibawah untuk melihat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibuat pada saat ini, adapun tinjauan pustaka berikut :

- (1.)Tinjauan *Transnational Organized Crime* (TOC) Pada Kasus Penyelundupan1Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018 oleh Dwi Prasetyo, Lidyah Ayu Suhito dengan hasil penelitian Globalisasi memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan manusia namun dengan munculnya era globalisasi tak jarang pula terjadinya kasus-kasus kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba oleh kapal asing Sunrise Glory di perairan Batam. Perbedaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Golden Triangle sebagai penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara sementara persamaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa globalisasi yang berdampak pada kemajuan transportasi membuat para pengedar narkoba lebih muda melakukan penyelundupan
- (2.) Penguatan Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Terkait Dengan Perikanan Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related To Fisheries Tahun 2020 oleh Ayu Mawar Rini dengan hasil penelitian Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu memiliki visi yang kuat, mandiri dan maju serta kontribusi yang positif sesuai dengan kepentingan nasionalnya, terkait

dengan kebijakan kelautan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sebab kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, seperti pada kasus penyelundupan sabu oleh kapal Sunrise Glory dengan

memanfaatkan kurangnya pengamanan di perairan laut. Perbedaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Sebagai poros maritim dunia Indonesia tidak tinggal diam untuk memerangi narkoba sehingga ada kerjasama yang terjalin untuk memerangi masuknya narkoba melalui wilayah perairan Indonesia sementara persamaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa sebagai negara yang memiliki perairan yang luas tentu Indonesia sering mengalami tindakan kriminal di laut yang dilakukan oleh kapal asing

(3.) Studi Normatif Tentang Penggunaan Justice Collaborator Dengan Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Narkotika Tahun 2020 oleh Madjen Silaban dengan hasil penelitian Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu memiliki visi yang kuat, mandiri dan maju serta kontribusi yang positif sesuai dengan kepentingan. Perbedaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Batam, Indonesia merupakan jalur khusus yang sering diakses untuk menyelundupkan narkoba sementara persamaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa UNODC menunjukkan hasil yang meningkat di Asia Tenggara

(4.) Strategi Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Sebagai *Deterrence* Terhadap Ancaman Kejahatan Transnasional Peredaran Narkoba Melalui Jalur Laut Tahun 2019 oleh Joko Aji Wibowo dengan hasil penelitian Kapal Sunrise Glory sudah menjadi incaran sejak beberapa tahun silam, diketahui

bahwa kapal tersebut sering melakukan penyelundupan narkoba dengan memanfaatkan perairan. Merujuk pada teori keamanan maritim maka pentingnya pencegahan dan penangkalan di laut sebagai prioritas ancaman utama yang mengganggu keamanan maritim Indonesia. Perbedaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Diketahui Sunrise Glory sempat berganti nama beberapa kali dan diketahui memiliki induk kapal sementara persamaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Keamanan maritim perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas wilayah maritim Indonesia

- (5.) Tinjauan Yuridis Tentang Kapal Asing yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 oleh Dalinda, Wilda Assa dengan hasil penelitian Penegakan hukum kapal asing yang melanggar batas wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 bahwa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan memberdayakan citra laut yang sesuai dengan hukum laut internasional, kapal pengawasan di laut diperkenankan untuk menahan, memberhentikan memeriksa kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran di perairan Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Asean memiliki sub-komite yakni ASOD untuk menanggulangi narkoba dan negara memiliki kewajiban atas kebijakan narkoba yang masuk ke wilayahnya masing-masing sementara persamaan yang sedang diteliti dengan sebelumnya bahwa Indonesia menangkap kapal Sunrise Glory dan menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Keamanan

Keamanan sering ditafsirkan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan negara dari suatu ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Konsep keamanan menekankan kemampuan pemerintah untuk memelihara integritas teritorial suatu negara, beberapa tindakan yang dilakukan negara antara lain 1). Penggunaan diplomasi 2). Implementasi konsep keamanan 3). Kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat termasuk terorisme. Keamanan muncul tentu ada sebuah ancaman yang dapat membahayakan negara biasanya sifat ancaman ini dikenal dengan persenjataan militer dari negara lain namun saat ini ancaman tersebut tidak hanya terkait perang militer melainkan aksi kriminalitas transnasional, siber, terorisme dan sebagainya. Maka dari itu keamanan merupakan kebijakan politik pemerintah dengan tujuan membangun situasi yang aman dan kondusif untuk mempertahankan tujuan vital nasional (Faruk, 2006).

Kebijakan keamanan yang strategis pada esensinya ialah sebuah politik negara dalam menata pertahanan dan keamanan negara. Dengan menggunakan kekuatan politik seperti diplomasi salah satu upaya untuk mewujudkan keamanan nasional untuk mempertahankan keamanan negara tidak lepas dari pembedaan antara TNI dan Polri berdasarkan klasifikasi masalahnya, penggunaan kebijakan strategis ditujukan pada keamanan untuk mengkonfrontasi ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan ancaman keamanan nasional dan konvensional, lalu untuk membangun kekuatan keamanan adanya pertimbangan dari segi geografi, demografi, dan kondisi sosial, adanya kerjasama dengan negara asing juga

menjadikan jembatan untuk menuju keberhasilan penggunaan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Inti dari keamanan menurut Buzan adalah kemampuan negara untuk mempertahankan diri dalam menyikapi suatu ancaman yang nyata, masalah keamanan dapat menjadi sebuah isu jika sudah diterima oleh masyarakat luas apabila keamanan tersebut berubah menjadi suatu bentuk ancaman. Tentu negara mempertahankan segala kekuatan untuk terus meningkatkan keamanan dari aspek ekonomi, militer, politik dan diplomasi yang mana keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia, keamanan saat ini memiliki dua pendekatan yakni keamanan tradisional artinya ancaman keamanan berasal dari militer negara lain dan negara adalah subjek serta objek untuk menciptakan keamanan, lalu keamanan non tradisional artinya ancaman muncul dari non-actor atau non-state maka keamanan tidak hanya mencakup negara saja melainkan masyarakat, ham, individu.

1.6.2 Keamanan Maritim

Keamanan maritim dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas wilayah perairan Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, oleh karenanya Indonesia rentan akan berbagai sumber ancaman keamanan maritim seperti *illegal fishing*, pembajakan, terorisme, penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya, dengan munculnya ancaman tersebut dapat mengganggu keamanan dan kepentingan nasional bahkan ke ranah global. Menurut Burhan D (2003) untuk memerangi masuknya narkoba ke wilayah teritorial tidak hanya mengandalkan aktor-aktor pengurus keamanan tetapi melibatkan lembaga keamanan dan institusi pemerintah lainnya, hal yang paling penting ialah lembaga-lembaga fungsional yang menciptakan sumber daya nasional yakni aparatur negara, masyarakat politik,

aparatur politik serta dimensi-dimensi lain yang dapat memperkuat keamanan nasional di suatu negara.

Adanya keinginan untuk merealisasikan pemeliharaan tatanan di perairan laut (*maintaining good order at the sea*) karena laut kini sudah menjadi wilayah yang harus ditanggung jawabi baik dari segi sumber daya alam, medium transportasi sebagai aspek yang penting bagi kehidupan. Oleh karena itu prioritas keamanan maritim yang tinggi ditujukan untuk menjaga keselamatan maritim dari aspek kejahatan yang terjadi di laut pembajakan, penyelundupan, terorisme, yang mengancam penggunaan laut secara damai maka jika adanya aktivitas yang mencurigakan di laut hal tersebut dapat dilakukan dengan tindakan hukum dan norma yang berlaku di suatu negara sebagai bentuk langkah yang tegas dan juga ketat (Makmur, 2009).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkannya penanganan komprehensif di laut dalam menangani peredaran gelap narkoba (Sinaga, Mulyadi, 2022). Penanganan peredaran narkoba melalui konsep maritim sebagai pertahanan dan perlindungan negara, mengkoordinasi dan mengatur peran angkatan laut serta keterlibatan pihak yang berwenang meskipun keterlibatan tersebut belum menyeluruh dan masih banyak perairan Indonesia yang belum memiliki penjagaan secara ketat, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan baik aspek hukum, aspek sumber daya, aspek kelembagaan (Fauzan, 2019).

Keamanan maritim tidak muncul begitu saja namun keberadaan suatu ancaman adalah suatu usaha kegiatan negara untuk melindungi keutuhan wilayah dan dapat didefinisikan secara berbeda tergantung pandangan para ahli, Bandoro (2013) bahwa ancaman adalah potensi yang membahayakan hakikat negara yang

dapat memungkinkan terganggunya dan berpengaruhnya ke lingkup negara dan masyarakat (Nengah, 2016). Salah satu ancaman keamanan maritim yaitu penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang kerap terjadi di wilayah maritim Indonesia, data BNN menunjukkan pada tahun 2022 sekitar 1,95% narkoba terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sekitar 1,80% artinya penanganan dan penjagaan yang ketat harus lebih ekstra dilakukan mengingat dampak buruk kedepan bagi aspek warga negara (Hartono, 2023).

1.6.3 Trans Organized Crime

Kejahatan terus mengalami perkembangan seiring dengan zamannya, seperti halnya kemampuan memasuki batas wilayah tanpa batas di suatu negara penyebab munculnya kejahatan modern. Seiring dengan perkembangan tersebut, kemudahan transportasi seperti jalur laut, udara, dan darat dalam kejahatan lintas negara yang terorganisir tumbuh dengan sangat cepat hingga mengalami kekhawatiran yang serius. Kejahatan lintas negara membuktikan bahwa kelompok teroris memiliki pendanaan dan hubungan erat dalam kasus penyelundupan narkoba, seperti halnya Indonesia sedang dihadapi dengan tantangan besar dalam upaya perlindungan warga negara, penegakan hukum dalam rantai kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara yang terorganisir dalam kasus penyelundupan narkoba melibatkan pemerintah dalam memberantas ataupun memerangi masuknya narkoba ke wilayah Indonesia, sebab hal tersebut berdampak langsung pada keamanan nasional, mengganggu kedaulatan negara dan mengancam stabilitas ekonomi negara.

Bagan Toc dan Keterkaitan



Sumber : Allum & Gilmour, 2012, bagan disusun oleh peneliti

Berdasarkan penjelasan Allum & Gilmour, 2012, beberapa aspek dalam konsep TOC adalah sbb (i) Pemerintah, bahwa negara-negara menetapkan kegiatan transnasional motif dan sifatnya adalah sama dengan beberapa hubungan kriminal terorganisir negara, (ii) Hukum dan Ancaman, bahwa kejahatan terorganisir merupakan suatu perbincangan hingga diatur ke dalam konvensi-konvensi yang terkait sebagai ancaman keamanan dengan masalah yang berkembang maka ada konsekuensi yakni penguatan dan kerjasama antar negara, mekanisme, bantuan internasional, hukum sebagai alat penegak dan menghasilkan legitimasi (iii) Evolusi, dari faktor identifikasi suatu masalah di wilayah tentunya berhubungan dengan hukum yang lemah, kelembagaan atau negara, hubungan pemerintah dengan TOC selain itu adanya praktik TOC yakni (1.) Operasi dilakukan dengan negara luar bahwa sindikat mempunyai hubungan dengan individu, migran, komunitas setempat, (2.) jaringan lintas batas dengan memobilisasi dan memelihara suatu hubungan agar dapat dieksploitasi secara kriminal (3.) Melewati garis batas internasional biasanya sindikat mengharuskan melewati jalur yang sah yang mana

hal tersebut membutuhkan dokumen resmi dan melintasi perbatasan secara tidak mencolok untuk meloloskan diri

Dari penjelasan diatas, kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi internasional menimbulkan dampak buruk di seluruh negara tidak hanya di Indonesia saja, pemerintah melibatkan aktor negara seperti BNN, Badan Hukum Negara, Angkatan Laut, dan non negara untuk bersama-sama bergerak dalam aksi memerangi masuknya narkoba ke Indonesia dan menjaga wilayah teritorial Indonesia. Dalam dunia narkoba ada yang disebut sebagai distributor, bandar, pengedar dan penjual, para pelaku tertangkap bukan hanya dari Indonesia saja melainkan adanya keterlibatan dengan warga negara asing dikarenakan para kelompok mafia merupakan organisasi kejahatan internasional terjerat dalam peredaran narkoba di Indonesia oleh karena itu keresahan semakin bertambah bahwa organisasi kejahatan tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi untuk memudahkan penjualan (Zainab, 2013).

Sejumlah pandangan terhadap kejahatan terorganisir yang paling penting 1.) kejahatan terorganisir merupakan fenomena yang muncul pada tahun 1990-an 2.) hampir sebagian besar memiliki hubungan dengan skala besar organisasi kriminal 3.) organisasi kriminal yang juga bekerja sama dengan negara lain 4.) kejahatan transnasional yang terus berkembang akibat masuknya globalisasi yang terus berkembang beberapa dekade 5.) masuk ke ranah bisnis illegal. Hal tersebut menunjukkan kejahatan terorganisir terus mengalami peningkatan, kejahatan terorganisir tidak semata-merta orang namun barang dan jasa yang dikirim melalui perbatasan, memungkinkan terjadinya kejahatan terorganisir dengan menyelundupkan barang dan jasa atas ketersediaan di beberapa negara atau harga

barang dan jasa yang membuat keuntungan bagi kartel (Ekho, 2022).

1.6.4 Kerjasama Internasional

Konvensi Palermo 2000 menyebutkan “Kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok terorganisir” konvensi mengakui betapa pentingnya meminimalisir kejahatan lintas batas terhadap individu atau kelompok, penegakan hukum yang disebutkan di dalam Konvensi Palermo “Bagaimana mempererat kerjasama dalam penegakan hukum yang luas untuk melawan kejahatan lintas penyelundupan narkoba baik di negara transit ataupun di negara tujuan, oleh karena itu diperlukannya kerjasama tingkat bilateral, multilateral, pemerintah, masyarakat. Menjadi titik kerjasama kejahatan terorganisir sebagaimana tindakan-tindakan penanganan dapat dilakukan 1.) proses saling membantu dalam investigasi, 2.) bukti fisik yang dikumpulkan dikembangkan menjadi kesepakatan, 3.) wajib untuk memberikan informasi terkait kasus kriminal terorganisir, 4.) berhak memberitahu kepada negara yang mana bendera tersebut terpasang di kapal namun dicurigai melakukan penyelundupan narkoba. Negara menyadari bahwa kejahatan terorganisir tidak dapat dilakukan oleh satu negara sebab kejahatan tersebut melibatkan banyak kelompok serta sindikat yang berperan di berbagai negara dan para sindikat memanfaatkan perbedaan dan regulasi hukum di negara lain yang masih lemah atau sulit terdeteksi.

ASEAN sebagai organisasi di Asia tenggara yang mewadahi kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam kejahatan lintas batas yang melibatkan pejabat negara, polisi, tentara serta aktor non-negara dalam penanganan kejahatan lintas batas negara dapat dilakukan dengan berbagai cara namun tidak dapat diselesaikan

oleh satu negara saja maka negara-negara ASEAN terlibat untuk memikirkan penanganan yang tepat untuk menanggulangnya dan bagaimana komitmen politik negara pihak dengan sistem peradilan dalam implementasinya (Atmasasmita, 2021). Perdagangan narkoba di Asia Tenggara semakin kompleks dengan meningkatnya konsumsi lokal terutama negara kawasan segitiga emas, akibat dari maraknya pergerakan narkoba di Asia Tenggara, tepatnya pada tahun 1972 ASEAN membuat kebijakan narkoba yaitu *ASEAN Drugs Experts Meeting On The Prevention And Control Of Drugs Abuse* disepakati di Manila, Filipina. tertuang di wadah ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) tahun 1984. (Hardana, 2022), sejalan dengan Konvensi Palermo, Indonesia meratifikasi pada bulan Desember tahun 2000 dan diikuti oleh Singapura pada 28 Agustus tahun 2007 dari kedua negara yang menganggap kejahatan terorganisir dapat mengganggu kepentingan nasional sehingga ada tahap-tahap penegakan hukum tentunya.

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418 menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional negara-negara bekerjasama sebab adanya kepentingan dan tujuan yang akan dicapai :

"cooperation can be interpreted as relationships that are established without coercion and violence and are legally valid, as in the international organizations of the UN or the European Union. State actors establish cooperation through international organizations which are interpreted as a set of rules, norms, regulations, decision-making procedures with the hope that these interests can meet in the scope of international relations"

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Keamanan Nasional

Secara umum keamanan negara merupakan hal yang penting atau inti utama

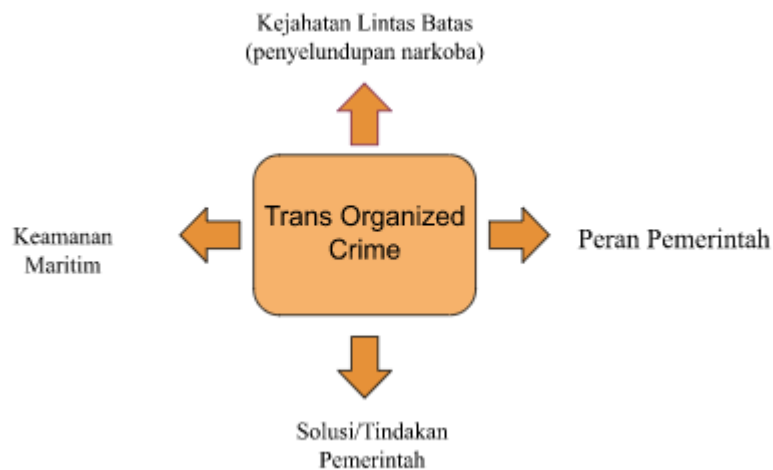
yang meliputi keutuhan wilayah, kesejahteraan rakyat, kedaulatan, kesatuan dan rezim, keamanan nasional tentu banyak mengalami permasalahan yang dinamis dengan resiko yang selalu ada sehingga muncul rintangan-rintangan di dalamnya seperti menjamin keamanan yang berkelanjutan, membangun kemampuan yang kuat untuk menjaga keamanan dan mengatasi resiko dari bahaya yang sesungguhnya. Selanjutnya, keamanan tersebut memastikan kredibilitas wilayah negara dari pihak asing yang mencakup wilayah perbatasan, pertahanan wilayah laut dan udara (National security.com, 2024). Beberapa ahli seperti Buzan menyatakan keamanan dapat diartikan sebagai bentuk upaya dalam mengelola segmen ancaman untuk merealisasikan lingkungan hidup yang bebas dari ancaman yang mana menurut Wolfer keamanan yang dimaksud bahwa absennya suatu ancaman di suatu negara, menurut Bandoro keamanan ialah hal yang masih berkaitan dengan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Disisi lain keamanan maritim menjelaskan adanya suatu elemen kepentingan nasional dalam bidang maritim dan aktor-aktor menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan laut, pihak PBB berpendapat keamanan maritim merupakan suatu keamanan yang di dalamnya terdapat ancaman berupa terorisme maritim, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata, pencurian ikan secara ilegal. Bueger (2015), keamanan maritim memiliki korelasi dengan konsep ketahanan maritim, usaha pengembangan di laut, kesejahteraan laut dan reaksi bahaya di laut oleh karena itu keamanan maritim tidak hanya sebatas tanggung jawab pemerintah namun keterlibatan non pemerintah juga harus turut ikut serta untuk menjaga keamanan laut dari bahaya ancaman. Untuk mewujudkan kedaulatan di laut, keamanan maritim memiliki peran penting sebab adanya hubungan untuk

mengatur serta memanfaatkan wilayah laut secara maksimal oleh suatu negara yang memiliki kewajiban penuh tanpa adanya pihak asing yang mencampuri (Iswardhana, 2021).

Berkaitan dengan ancaman keamanan maritim sebagaimana kasus kapal Sunrise Glory yang melintasi perairan Selat Philips di Batam dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas penjagaan di laut untuk dilakukannya pengecekan kapal. Selama proses pengecekan di dermaga kapal berbendera Singapura diketahui membawa sabu sebanyak 1 ton yang disimpan di dalam karung pada 7 Februari 2018 silam, BNN mencurigai bagian-bagian kapal yang masih menyimpan sabu sehingga dilakukannya pembongkaran bersama pihak Angkatan Laut (Kompas.com, 2018). Pada kasus tersebut kita dapat melihat ancaman di laut sangat rentan akan masuknya kapal asing yang membawa sabu kerap terjadi hingga saat ini, berdasarkan data BNN 80% diselundupkan melalui jalur laut hingga masih menjadikan kekhawatiran bagi pihak-pihak yang saling bekerjasama. Jika diperkirakan bahayanya narkoba dengan jumlah 1 ton akan mematikan 5-6 juta penduduk sekaligus, BNN menyatakan jika kerugian ekonomi tersebut mencapai Rp. 63 triliun tiap tahunnya selain itu kerugian akan terus bertambah dikarenakan aksi penyelundupan di laut yang semakin gencar dan zat sintetis yang semakin baru (Detik.com, 2018).

Bagan Trans Organized Crime (Inspired by Allum and Gilmore)



Sumber : Alum & Gilmour, 2012 , bagan disusun oleh peneliti

kejahatan terorganisir yang mengakibatkan munculnya kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius yang menyangkut keamanan dan kemakmuran global sebab kejahatan ini melibatkan banyak negara, Indonesia dengan letak geografis yang strategis dengan wilayah maritim yang luas sehingga banyak jalur laut yang tidak terjangkau keamanannya maka pemanfaatan jalur-jalur tikus oleh sindikat internasional digunakan untuk kepentingan bisnis yang menjadi ancaman keamanan maritim sebagai tugas bersama-sama.

Oleh karena itu, terutama peran pemerintah yang penting atas kejadian tersebut diperlukannya tindakan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut yang dapat merugikan aspek sosial, ekonomi, politik suatu negara maka diperlukannya solusi yang dapat mencegah penyelundupan narkoba sehingga pemerintah melakukan solusi dengan cara bekerja sama dengan negara lain dalam penanganan, kerjasama antar pihak-pihak yang

berkaitan dengan narkoba sebab negara mengetahui jika kejahatan terorganisir tidak hanya narkoba namun cakupan yang luas yang memungkinkan organisasi internasional, kerjasama multilateral-bilateral terjalin (Kementerian Luar Negeri RI, 2024).

1.7.2 Kejahatan Penyelundupan Narkoba

Suatu kejahatan lintas negara yang terorganisir adalah suatu kejahatan besar yang dilakukan dalam penggunaan dan pengedaran narkoba, kejahatan narkoba yang terjadi sudah melewati lintas batas negara di suatu negara hingga tindak pidana transnasional narkoba tidak bisa dianggap rendah oleh karenanya penanganan juga dilakukan dengan cukup serius. Perkembangan kejahatan transnasional dalam kasus narkoba terus mengalami pertumbuhan secara bersamaan pemerintah berusaha untuk memutuskan rantai jaringan narkoba internasional, pelaku kejahatan juga tidak menyerah untuk terus menyelundupkan narkoba dengan berbagai cara modus operandi untuk melancarkan aktivitas ilegal tentunya didorong oleh keberadaan globalisasi yang berpengaruh ke mobilitas sosial dan pola pikir masyarakat sampai kejahatan tersebut mengalami evolusi (Pranasita&Sugiartha, 2023).

Kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan lintas batas negara yang mempunyai beberapa aspek penting diantaranya 1.) dilakukan lebih di satu negara 2.) persiapan, perencanaan, monitoring dilakukan di negara lain 3.) melibatkan kelompok kejahatan terorganisir 4.) dampak yang serius, kejahatan terorganisir memiliki ciri khasnya tersendiri seperti pencucian uang dari perdagangan gelap baik dari kegiatan kriminal ataupun kegiatan ekonomi yang sah, meningkatkan konektivitas keluar negeri, bekerjasama dengan kelompok terorganisir lainnya maka pembagian karakteristik dibagi ke dalam dua bentuk pertama pada target

politik dan yang kedua target sasaran ekonomi seperti mafia, kartel yang sifatnya dapat merusak keamanan dan tatanan negara dimana para pelaku sebagian besar ialah aktor non-negara (Muhammad, 2015).

Perkembangan kejahatan transnasional semakin berkembang hingga diidentifikasi sebagai ancaman keamanan, pelaksanaan kegiatan ilegal tidak menghiraukan ancaman kemanusiaan sampai diidentifikasi pada ancaman keamanan negara. Kejahatan transnasional dengan lintas batas negara mengabaikan bentuk aturan kedaulatan negara atau dapat dikatakan jika kejahatan tersebut mengabaikan batas yurisdiksi negara, seperti halnya pada kasus penyelundupan narkoba para sindikat tentu melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan bisnis ilegal yang sedang berlangsung baik melawan aparat yang bertugas maupun melanggar hukum, sektor yang mempengaruhi ancaman tersebut adalah kehidupan sosial dan perekonomian dengan menyelundupkan barang ke dalam negeri dari luar negeri maka berkurang juga produksi dalam negeri (Wangke, 2011).

1.7.3 Kerjasama Keamanan

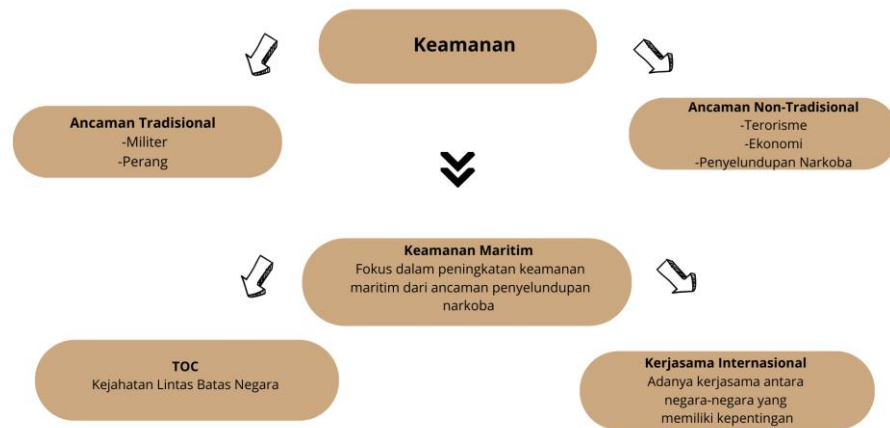
Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional harus dilakukan karena adanya spekulasi bahwa negara tidak mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya secara mandiri oleh sebab itu kerjasama antar negara dilakukan sebagai bentuk bantuan secara langsung ataupun tidak langsung. KJ Holsti berpendapat *“the formation of a cooperation with the government to approach each other with a proposed solution or discuss the problem, present technical evidence to agree on one solution or another and end the negotiations with an agreement or understanding that satisfies both parties”*, isu utama dari

kerjasama internasional menjelaskan sejauh mana kerjasama tersebut berhasil dan saling menguntungkan dari apa yang diperoleh (Riana, 2016). Langkah tersebut adalah suatu langkah penanggulangan narkoba dan obat-obatan yang berbahaya guna merealisasikan kawasan ASEAN bebas narkoba dengan fokus pada 1.) membangun penegakan hukum sesuai kemampuan negara ASEAN, 2.) bekerjasama dengan pihak Bea Cukai dan Pabean atas kontrol masuk-keluarnya barang, 3.) kampanye pencegahan narkoba, 4.) memperkuat *Border Liaison Offices* untuk meningkatkan kapasitas kerjasama regional (ASEAN, 2003).

1.8 Alur berpikir

Keamanan adalah suatu proses dimana seorang aktor negara menyatakan isu tertentu menjadi sebuah ancaman hingga adanya tindakan darurat dalam menanggapi kasus tersebut, oleh karena itu pemimpin negara memiliki strategi untuk mempertahankan keamanan negaranya sehingga diselenggarakan oleh pemerintah untuk keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan warga negara serta mempersiapkan kemampuan untuk menangkal ancaman dari dalam dan luar negeri. Buzan (1991) konsep keamanan terbagi ke dalam 2 bentuk yakni keamanan tradisional dan non tradisional, perbedaan dari 2 fokus Barry Buzan bahwa keamanan tradisional berfokus pada aktor negara yang menjadi peran utama dalam ancaman yang disebabkan dari militer maka negara berperan sebagai subjek dan objek keamanan sementara fokus keamanan non tradisional tidak hanya tentang militer melainkan banyak fokus seperti keamanan lingkungan, keamanan individu dan sebagainya (Djuyandi, 2023). Melihat kasus yang diangkat pada skripsi ini bahwa ancaman tersebut muncul dikarenakan penyelundupan lintas batas negara yang dilakukan oleh 4 warga asing yang masuk ke perairan Selat Philips, Batam, Indonesia.

Bagan Keamanan dan Keterkaitan



Sumber : Darwis, 2023

1.9 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dibentuknya kerjasama Indonesia-Singapura untuk memerangi narkoba dan mendeteksi sindikat-sindik internasional agar meminimalisir terjadinya penyelundupan di wilayah-wilayah negara tersebut sehingga melibatkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

1.9.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data dari suatu fenomena, aktivitas, dari proses yang terjadi dimana peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data dan fakta (Abdussamad, 2021).

1.9.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena.

1.9.3 Situs Penelitian

Proses penelitian dilakukan untuk menemukan masalah yang diteliti maka

dari itu penelitian ini dilakukan di Semarang karena penulis memanfaatkan studi literatur, kajian pustaka dan literatur review.

1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berfokus pada kerjasama internasional yang dijalankan oleh Indonesia-Singapura dalam rangka memerangi narkoba di masing-masing negara

1.9.5 Sumber Data

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer merupakan data yang dihasilkan dari wawancara, responden, narasumber asli untuk memperoleh informasi yang aktual, Menurut Sugiyono (2008:402) data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari dokumen, jurnal, buku, pustaka, ataupun data yang sebelumnya pernah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya, laporan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan mengumpulkan informasi melalui media web, buku, jurnal, literatur dan data dari hasil penelitian sebelumnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan studi literatur yakni jurnal, buku guna memperoleh data melalui kajian pustaka dan menggunakan sumber-sumber yang valid dari internet seperti informasi, isi, dokumen, situs resmi pemerintah, laporan riset penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang dibahas untuk mendukung data penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sangat penting dalam sebuah penelitian baik itu dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan adanya penelitian analisis merupakan

suatu proses mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penjabaran ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam bentuk pola, menghubungkan dengan konsep yang digunakan, memilah kembali bagian-bagian yang penting sehingga informasi yang dijabarkan mudah dipahami (B. Milles dan Huberman, 2014). Dalam peneliti, penulis akan menggunakan sumber yang valid beberapa langkah-langkah yang dilakukan yakni, *pertama*, mengumpulkan data, dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin menggunakan teknik studi kepustakaan, studi dokumentasi, *kedua* menganalisa data yang sudah diperoleh, *ketiga*, menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian sangat diperhatikan dengan mengacu pada kemampuan menyampaikan masalah yang ditulis, menentukan manfaat penelitian, melakukan pemeriksaan data kembali apakah data yang diambil sudah cukup valid dan kredibel dengan memanfaatkan literatur dan web yang tersedia, memastikan kembali cakupan isu yang diangkat serta data yang diperoleh.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Golden Triangle



Gambar 6. Sungai Mekong
Sumber : Kompas.com, 2023

Perdagangan narkoba yang marak terjadi menjadikannya sebuah ancaman jangka panjang terhadap keamanan maritim Asia Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir segitiga emas menjadikan tempat produksinya narkoba hanya saja mereka memperluas jalur perdagangan dengan melewati jalur perairan dan menjadikannya pusat perhatian. Salah satu kawasan di Asia Tenggara terdapat wilayah yang dikenal dengan sebutan *Golden Triangle* (Segitiga Emas) dimana 3 negara yang saling berbatasan yakni Laos, Myanmar, Thailand, perbatasan tersebut dikenal sebagai Sungai Mekong, memiliki panjang sekitar 4.350 kilometer yang melintasi perbatasan internasional, sungai yang telah lama dijadikan tempat perpindahan manusia dan barang dengan menggunakan kapal-kapal kecil antar kota. Tidak hanya sebatas itu namun sungai ini merupakan jalur penting arus transit ekonomi diketahui lebih dari 300.000 ton barang dikirim melalui jalur tersebut. Besarnya

peran Sungai Mekong dalam kegiatan ekonomi, pembangunan sosial sehingga terbukanya tindak kriminal dengan memanfaatkan perdagangan narkoba melalui *unofficial crossings* dengan melihat letak yang strategis *Golden Triangle* yang menguntungkan (Rugun, 2018).

Hal tersebut didukung atas peminat yang tinggi dan semakin meningkatnya kapal- kapal yang bekerjasama untuk mengangkut narkoba dengan berat yang besar, diketahui kapal-kapal tersebut berjenis pesiar mewah, perahu pompa yang telah dimodifikasi maka semakin berkembang pula jaringan narkoba. Semakin meluasnya peredaran tersebut mengakibatkan dampak negatif penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bahkan menimbulkan peningkatan sindikat internasional di wilayah tersebut, memperluas rute-rute maritim yang terlibat.

Kecanduan obat-obatan seperti Indonesia-Malaysia ditambah dari faktor sosial-ekonomi diperkirakan akan terus meningkat terlebih lagi posisi segitiga emas yang strategis untuk melakukan penyelundupan ke kapal semakin membanjiri pasar konsumen. Dibalik perdagangan narkoba yang terjadi adapun dampak yang dirugikan di wilayah tersebut, mereka direkrut oleh sindikat internasional untuk memindahkan narkoba dengan cara menyewa kapal ikan milik nelayan setempat dengan berkedok menangkap ikan. Bahkan nelayan dibayar untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan patroli penegak hukum. Tidak adanya alternatif pendapatan keberlanjutan membuat nelayan masuk ke dalam perdagangan ilegal.

Ekonomi mempengaruhi terjadinya penyelundupan narkoba di suatu negara atau wilayah sebab ada beberapa kondisi yang mendorong individu dan masyarakat untuk mendapatkan omset yang praktis diantaranya 1.) Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi bahwa pendapatan dan kebijakan pembangunan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang belum merata sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keterbatasan sistem sosial dan budaya yang menyebabkan kemiskinan semakin berkembang, 2.) Pengangguran yang diakibatkan dari keterbatasan lapangan kerja sehingga mempengaruhi kriminalitas yang semakin tinggi terutama dalam bisnis penyelundupan narkoba dengan nilai yang fantastis. Seiring berkembangnya globalisasi penyelundupan narkoba melalui jalur laut melibatkan nelayan di wilayah setempat hal ini di dasari untuk melancarkan aksi dan monitoring di laut dan darat dari penjagaan aparat di satu pendapatan nelayan yang tidak pasti menjadikan hal tersebut kunci utama untuk ikut dalam kegiatan ilegal demi menghasilkan pundi-pundi secara cepat.

Untuk mendapatkan pemasukan dengan instan dengan cara mengedarkan narkoba sebagai bisnis yang cukup memberikan keuntungan yang besar, sulitnya masyarakat di suatu negara untuk memperoleh pekerjaan sehingga memutuskan untuk menjalankan aksi penjualan narkoba, pengaruh budaya barat sebagai bentuk globalisasi sebagai trend terkini dan letak geografis. Saat ini peredaran sudah menduduki pelosok wilayah tanpa melihat status sosial masyarakat, tidak hanya berasal dari musisi, orang berpendidikan, kalangan pejabat sebab narkoba saat ini memiliki banyak varian jenis dan harga dari termurah hingga termahal maka dari itu siapa saja dapat membelinya (Lukman, 2021).

Omset Hasil Penjualan Narkoba Per Tahun

Tahun	Jenis Narkoba	Berat Satuan	Omset Penjualan
2018	Sabu Metamfetamin	20.7 kg 20.8 kg	10 miliar
2019	Sabu	26 kg	60 juta-1 miliar
2020	Sabu	20.9 kg	52 miliar
2021	Sabu	20.9 kg	52 miliar
2022	Ganja Sabu	791 kg 2,27 kg	110,88 miliar

Sumber : BNN Batam, 2020

Bisnis narkotika yang menjanjikan di pasar internasional membuat keuntungan yang berlipat bagi para pengedar dan produksi meskipun UU terkait narkotika diberlakukan namun tidak mudah menghentikan aksi ilegal para *The Drugs Lords*, semakin ketat keamanan yang dibuat semakin cerdas pula para sindikat dari dalam ataupun luar negeri meluncurkan usahanya, hal ini tidak lepas dari globalisasi yang memudahkan akses antar benua. Beberapa faktor terkait di antaranya 1.) para aparat yang bertugas kurang cermat dan minimnya teknologi deteksi narkoba, perbatasan kecil yang masih dapat diakses sindikat internasional untuk masuk ke wilayah Indonesia, 2.) sulitnya membongkar jaringan narkoba dikarenakan banyak pihak yang berkepentingan, 3.) permintaan yang tinggi dari dalam negeri membuat para sindikat memperkuat laba sebesar-besarnya dan didukung oleh dinamika internet serta teknologi untuk memudahkan pasar terlibat dalam transportasi dan komunikasi (Elyta, 2020).

Produksi narkoba di Asia Tenggara telah ditemukan sejak abad ke-19 yang artinya kegiatan tersebut telah berlangsung cukup lama dimana produksi dan budidaya narkoba jenis opium di kawasan Golden Triangle yakni Laos bagian utara provinsi Phongsaly, bagian barat provinsi Xien Khouang tepatnya di distrik Nonghet dan Xam Nue, Myanmar berada di provinsi Shan di distrik Wa dan Kokang sepanjang perbatasan Myanmar dan Cina, Thailand berada di pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Kejahatan maritim di segitiga emas yang terus berlanjut membuat badan penegak hukum terus mengalami gejala-gejala yang baru sebab kesadaran maritim merupakan tanggung jawab yang besar dan perlunya kerjasama dengan pihak yang terkait maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan narkoba. Terutama masyarakat pesisir yang harus didorong untuk membatasi perdagangan dan memberikan informasi seputar jaringan yang mencurigakan di laut. Dengan menyadari keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama maka pendekatan dilakukan dalam memerangi anti narkoba. Maka dari itu, diperlukannya koordinasi yang lebih besar baik pelatihan bersama atau komunikasi web (Asyura, 2023). Nyatanya perdagangan narkoba memainkan peran yang besar selama bertahun-tahun didukung oleh transportasi dari produsen ke wilayah konsumen, peredaran ini tidak pernah mengalami resesi dan penurunan produsen, pelaut yang menjadi kaki tangan para penyelundup profesional tanpa menyadari konsekuensinya, hampir tiap negara melakukan investigasi, penahanan, interogasi (Singh, 2019).

Tabel 3. Tabel Data Narkoba Heroin di 3 Negara

No.	Jenis Narkotika	Negara	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Heroin	Indonesia	1.4 kg	2.2 kg	2.8 kg
2.		Malaysia	3 kg	4.5 kg	2.1 kg
3.		Singapura	58 kg	38.2 kg	72.70 kg

Sumber : ASEAN, 2022

Efek dari penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia tentu menyerang lingkungan masyarakat dari segi ekonomi yang mana setiap saatnya pecandu tentu membutuhkan narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari ditambah dengan dosis yang bertambah dibandingkan barang lainnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya narkoba adalah komoditi yang sangat menjanjikan meskipun resiko ancamannya cukup berat (Eleanora, 2011). Sementara di Singapura efek penggunaan narkoba lebih diperhatikan pada kalangan muda dimana individu yang berusia 13-34 tahun mempunyai resiko penggunaan lebih tinggi dan kecanduan seumur hidup dengan rata-rata usia pemula adalah 19,6 tahun diantara 28% pengkonsumsi telah melakukan jauh dibawah umur dengan kekhawatiran tren global pemakaian narkoba yang merajalela dibawah usia 18 tahun dengan faktor lingkungan pertemanan, pengawasan keluarga, mencari hal-hal baru dan efek sosial media, digital ditambah dengan kehadiran e-commerce yang sulit dihambat pada praktik dagang narkoba (Teo, 2024).

Peredaran narkoba di segitiga emas semakin kuat yang juga melibatkan jaringan internasional. UNODC memprediksi, total regional pasar heroin di segitiga emas mencapai 8,7-10,3 miliar dollar AS per tahun. Belum ditambah produksi metamfetamin biasa dikenal dengan sabu dengan rata-rata omset per tahunnya mencapai 30,3-61,4 miliar AS, diketahui bahwa sabu merupakan jenis narkoba yang sangat diminati sehingga menggeser minat heroin, jika dilihat dari posisi utara Malaysia yang berseberangan langsung dengan Thailand sebagai pemasok dari segitiga emas ke Malaysia. Pada tahun 2021, disitanya sabu-sabu seberat 36,3 kilogram yang sebelumnya sempat melewati Malaysia lalu masuk ke Indonesia dan ekstasi sebanyak 10.000 butir, Singapura yang menyita narkoba dengan jumlah nominal sebesar 16,66 juta dolar Singapura yakni penyitaan heroin 68,22 kg, ganja 133,41 kg dan metamfetamin 28,15 kg (CNB Annual Statistic, 2022).

Dalam kasus ini penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang dipandang serius oleh pemerintah dikarenakan dapat merusak moral bangsa. Kota Batam secara geografis memiliki posisi dengan tata letak yang strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dengan kondisi yang bersebelahan dengan negara tetangga memudahkan akses untuk melakukan perdagangan internasional namun resiko dari keterbukaan pintu masuk meningkatnya kejahatan penyelundupan narkoba yang kerap terjadi di wilayah perairan (Murni, 2018). Peluang bagi para pengedar internasional memanfaatkan kesempatan dengan melihat lengahnya penjagaan di perairan Batam, jalur-jalur kecil yang kurang ketat dalam penjagaan oleh aparat penegak hukum. Faktor utama dari pengguna narkoba di Kota Batam yang tinggi jika dikalkulasikan per individu menghabiskan Rp.500.000 dalam satu bulan, dengan begitu motif utama pengedar ialah

penghasilan yang didapat dengan nominal yang fantastis (Bobby, 2021). Kategori penyesuaian dalam meminimalisir aksi penyelundupan yang sering terjadi di wilayah perairan yang dapat dilakukan :

- a.) Perumusan dan pelaksanaan yang strategis akan menilai keefektifan organisasi, lembaga, perbaikan struktur dan pengembangan sumber daya dalam mengantisipasi masalah yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional pasalnya jalur-jalur kecil di perairan Indonesia yang memudahkan akses masuk sindikat dari luar negeri menjadi tanggung jawab sehingga implementasi koordinasi dan komunikasi antar lembaga ditingkatkan bersama stakeholder secara rutin atau kegiatan khusus, peran masyarakat dimana masyarakat melakukan patroli patok batas dan penyuluhan dengan menjaga perbatasan negara tidak dapat dilakukan dengan sendiri sehingga ada keterlibatan negara lain yang berbatasan langsung. Implementasi strategis yang telah direncanakan sebagai wujud untuk memerangi masuknya narkoba ke Indonesia maka pimpinan organisasi melaksanakan tindak manajemen yang mengarah pada pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya yang maksimal meskipun perlu ditingkatkan lagi dengan mengawasi pergerakan distribusi obat-obatan ilegal.
- b.) Evaluasi dengan mengukur sejauh mana kerjasama internasional menghasilkan manfaat yang dapat dilihat dari persentasi masuknya narkoba apakah bertambah atau berkurang atas narkoba yang diselundupkan melalui perairan Indonesia (Alamsyah, 2023).

2.2 Kasus Penyelundupan Narkoba di Perairan Batam

Menurut Fella Alum (2012) *Trans Organized Crime* di kawasan Asia Tenggara terjadi dikarenakan memiliki banyak wilayah kemiskinan di antara kekayaan sehingga memotivasi berbagai bentuk ancaman kejahatan terorganisir dimana juga terjadi korupsi yang memfasilitasi serta peran elit yang mempengaruhi hal tersebut. Sejumlah “pusat” wilayah Asia Tenggara menjadikan tuan rumah seperti persimpangan transportasi, tempat pelaku tinggal, bertemu, bertransaksi (perencanaan, pencucian uang, penyediaan dokumen palsu) sehingga Asia Tenggara masih belum bisa mengimbangi kejahatan terorganisir yang semakin pesat, selain itu faktor upah yang rendah diberikan ke pemerintah dan polisi mendorongnya untuk melakukan bisnis ilegal dengan pebisnis yang lebih kaya sehingga dapat menyuap Bea Cukai, Imigrasi, polisi dan dapat mempengaruhi sistem hukum yang lemah.

Free Trade Zone yang ditetapkan dalam UU. No. 36 Tahun 2000 dan diubah menjadi UU. No. 44 Tahun 2007 dan PP No. 2 Tahun 2009 terkait kepabeanan, perpajakan cukai atas masuk dan keluarnya barang di kawasan perdagangan bebas dari segi industri, ekspor-impor, investasi yang berhubungan dengan perekonomian oleh badan khusus pemerintah Batam sesuai kewenangan yang diberikan (Putra, 2021) namun dibalik penerapan Free Trade Zone tersebut adanya kemiskinan yang terjadi akibat produk lokal yang tidak dapat bersaing dengan produk luar yang diselundupkan secara tidak sah harga produk luar yang lebih murah ketimbang produk domestik, wilayah kecil yang sulit dijangkau sering terlambat kedatangan bahan pokok sehingga lebih memilih mengambil dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia melihat jarak yang dekat dan lebih mudah diakses, maka dari itu Free Trade Zone tidak selalu menguntungkan ekonomi di Batam tetapi

banyak tindakan ilegal yang justru merugikan ekonomi Batam dan Indonesia.

64 titik pelabuhan tikus termasuk juga pelabuhan resmi di dalam kasus trafficking Batam dijadikan tempat transit yang nantinya barang selundupan akan dikirim ke Hongkong, Jepang, Korea, Australia, Timur Tengah, seperti contoh Bank Indonesia yang membantu penelusuran bersama polisi atas rekening tersangka pemilik pabrik sabu-sabu di Batam, menurut Direktur IV narkoba dan kejahatan terorganisir Mabes Polri, brigadir Jenderal (pol) Indradi Thanos bahwa pemilik pabrik sabu-sabu di Batam diduga melakukan praktik pencucian uang dengan membuka usaha ilegal, berikut data-data yang diambil dari berita terkait penyelundupan narkoba di Batam (Susanto, 2019).

Keterlibatan nelayan juga menjadi faktor pendorong penyelundupan narkoba terutama dari segi ekonomi dengan keterbatasan tersebut sindikat mengiming-imingi dengan bayaran yang fantastis, kurangnya diversifikasi ekonomi di wilayah pesisir maka jika ada kesempatan yang lebih besar mereka akan mengambilnya, keterjebakan dalam hutang-piutang baik untuk meminjam peralatan atau kapal, sebagian besar nelayan hidup dalam ketergantungan dari tangkapan ikan sementara dengan tawaran dari sindikat tentu jarang ada yang menolak meskipun tindakan tersebut dianggap ilegal namun untuk mendapatkan keuntungan dengan instan tentunya nelayan akan tergiur meskipun para nelayan mengetahui jika pekerjaan tersebut besar resiko untuk tertangkap, kehilangan pekerjaan (Kompas.com, 2018).

Tabel 4. Data Narkoba 5 Tahun Berturut

Tahun	Jumlah Kasus	Satuan Narkoba
2018	57 kasus	2,932 ton
2019	84 kasus	2,9 ton
2020	806 kasus	6,7 ton
2021	760 kasus	3,31 ton
2022	851 kasus	1,06 ton - 1094 ton

Sumber : BNN RI, 2021

Berkembangnya arus globalisasi dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan transformasi dalam hubungan antar negara dengan berkembangnya teknologi, informasi dan sumber daya manusia lintas batas Indonesia ialah hal yang biasa. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, kepulauan yang besar serta perairan yang luas sebagai jalur maritim, akibatnya banyak kapal asing yang masuk secara ilegal (Sineri, 2023).

Satu diantaranya adalah penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 ton yang dibungkus dalam bentuk karung terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan Kapal Sunrise Glory pada 7 Februari 2018 dilakukan tim gabungan TNI, tim bea cukai, dan lembaga lain yang bersangkutan, empat awak kapal yang merupakan tersangka ditangkap. Komandan Kapal KRI-Sigurot 864 mayor laut Arizona bintang sedang beroperasi dalam pengawasan perbatasan RI-Singapura 2018, adanya kecurigaan tim TNI yang menyadari pergerakan MV Sunrise Glory di perairan Selat Philips pada koordinat 01.08.722 U/103.48.022 T. Melintasnya Sunrise Glory di luar garis *traffic separation scheme* (TSS) menerobos Perairan

Indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Pada saat pemeriksaan lebih lanjut tidak ada data dokumen yang lengkap dan diketahui semua dokumen dari hasil pengecekan palsu. Kapal ini juga dinobatkan berbendera ganda karena diduga mempunyai nama Sun De Man 66 (Banjarmasin.post, 2018).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau dari website resmi menyatakan bahwa Asia Tenggara adalah produsen narkoba yang di ekspor ke Eropa, Amerika Utara, negara Asia lainnya. Lalu 80% untuk peredaran di Indonesia penyelundupan dilakukan melalui jalur laut. BNN Kepulauan Riau menerbitkan berita Kompas.com 2018 yang menjabarkan jika para pelaku perdagangan penyelundupan narkoba masuk ke wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal asing (kapal ikan). Pada Masa Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, petugas aparat di Pelabuhan Kepulauan Riau berhasil menangkap 4 kapal asing pada bulan Februari tahun 2018 dimana pelaku membawa narkoba dalam jumlah yang besar untuk diedarkan di Indonesia. Lalu pada tahun berikutnya 2021, Polda Riau menahan pelaku pengedar yang mempunyai narkoba seberat 23 kilogram dan 19 butir pil ekstasi dari Malaysia. Maka dari itu kasus-kasus penyelundupan kerap terjadi di Kepulauan Riau sebab wilayah perairan yang luas dan sangat dekat dengan perbatasan perairan dengan negara tetangga, akibatnya banyak pelabuhan tradisional yang biasa difungsikan pelaku kejahatan untuk memperlancar aksinya (Oktaviani, 2022).

Begitu juga tim yang memeriksa tidak menemukan alat tangkap ikan sebagaimana diketahui bahwa kapal tersebut ialah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan Taiwan. Tahun 2017 kapal Sunrise Glory sudah

menjadi Target Operator (TO) pada sekitar bulan November petugas BNN mendapatkan informasi yaitu ada kapal ikan Taiwan bernama MV Stun De Man 66 diduga mengirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 1,2 ton tujuan Australia melewati jalur Indonesia yang sebagian sabu tersebut akan diturunkan di wilayah Indonesia. Pihak BNN sempat melakukan koordinasi dengan pihak Australia Federal Police (AFP) pada tahap berikutnya Indonesia membentuk tim gabungan BNN, TNI AL, Bea Cukai untuk mendeteksi pergerakan MV Stun De man 66 khususnya di perairan pantai barat Sumatera, tepatnya pada 10 Desember 2017 terdeteksi kapal berada di perairan Selat Andaman, perairan pantai barat Sumatera, diduga kapal akan menuju Samudera Hindia kemudian perairan Australia. Dugaan tersebut terbukti pada tanggal 21 Desember 2017 Australia Federal Police memberikan informasi ke BNN dengan menangkap kapal The Valkoista yang membawa sabu seberat 1,2 ton, di perairan Australia, 250 mil dari pantai Perth, Australia yang diduga berasal dari kapal MV Stun De Man. Kemudian terdeteksi pada tanggal 28 Desember 2017 kapal berada di pelabuhan Jurong, Singapura dan meninggalkan pelabuhan pada tanggal 29 Desember 2017 menuju perairan Andaman, India (Prasetio, 2018)

2.3 Kerjasama Indonesia-Singapura Terkait Kejahatan Transnasional

Dalam Perdagangan Narkoba

Kejahatan transnasional ASEAN yang cukup tinggi terkait narkoba, merupakan fenomena yang menjadi sebuah tantangan terutama di Asia Tenggara, kawasan ini memiliki perdagangan narkoba terbesar yang dinamakan Golden Triangle, kejahatan narkoba juga disebut sebagai kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) yang berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara massif (Hatta, 2019). Mengetahui urgensi dan konsensus akan hal itu, organisasi ASEAN membentuk *Asean Drugs Expert* (ADE) pada tahun 1976 sebagai sub-komite yang mempunyai tugas untuk menangani lintas batas narkoba, seiring berjalannya waktu *Asean Drugs Expert* (ADE) berganti nama menjadi *Asean Senior Officials On Drugs Matters* (ASOD) pada tahun 1984 (Asean, 2022). *Asean Senior Officials On Drugs Matters* (ASOD) sebagai wadah untuk menangani kasus penyalahgunaan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan senjata, sea-piracy dan diharapkan dapat melindungi keamanan negara ASEAN dari ancaman narkoba selain itu dalam memerangi permasalahan yang sedang dihadapi agenda ini tertuang dalam “*ASEAN Work Plan Combating Illicit Drugs Production, Trafficking and Use*”. Perkembangan kasus narkoba di Asia Tenggara direpresentasikan ke dalam “*ASEAN Drug Monitoring Report*” (Laporan Pengawasan Narkoba Asean) yang disatukan tiap tahunnya untuk mendeteksi gerakan ilegal narkoba di negara kawasan ASEAN sehingga sangat berfungsi bagi ASOD ASEAN untuk melihat perkembangan suatu kebijakan di tiap negaranya terhadap narkoba. Masalah tentang kejahatan lintas batas negara dalam hal perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama dianggap fundamental bagi ASEAN yang dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu dua dekade yang terwujudkan dalam Joint Declaration For A Drug-Free ASEAN di tahun 1998 (Rizal, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian terkait kerjasama Pertahanan (*Agreement between the*

Government of Republic Indonesia and the Government of Singapore On Defence Cooperation) pada 27 April 2007 Tampak Siring, Bali, Indonesia. Usulan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 terkait pengesahan perjanjian antara pemerintah kedua negara yakni Indonesia dan Singapura yang disebutkan dalam Pasal 1. Menindaklanjuti hal tersebut, salinan naskah asli Persetujuan Kerjasama Bidang Pertahanan yang dibuat ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, meliputi :

- a. Rapat dan merundingkan kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan
- b. Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanganan terorisme
- c. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dengan pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, saling memberikan informasi termasuk dalam perkembangan proyek yang telah disetujui
- d. Peningkatan sumber daya manusia dari lembaga pertahanan dan militer melalui pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya
- e. Bersama-sama maupun masing-masing menjalankan latihan dan pelatihan, operasi bersama, dukungan kedua militer termasuk akses wilayah latihan serta fasilitas tertentu
- f. Search and rescue dan bantuan manusia serta operasi pemulihan bencana wilayah

Bagan Kerjasama BNN Indonesia - CNB Singapura



Dalam menghadapi kejahatan transnasional, Indonesia termasuk negara yang cenderung rentan sebab letak negara Indonesia yang strategis khususnya di segitiga emas. Oleh karena itu Indonesia meratifikasi pengesahan United Nations Conventions On Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2009 yang menyebutkan kategori kejahatan-kejahatan lintas batas negara untuk memerangi kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba yang memberikan implikasi negatif kepada Indonesia. Indonesia berpendapat narkoba adalah sebuah ancaman yang berdampak kepada kehidupan bangsa Indonesia, dapat mengganggu ketahanan nasional aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dengan melihatnya negara produsen berasal dari banyak negara maka Indonesia sadar akan pentingnya bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan diskusi terkait perang pada narkoba sebagaimana Indonesia juga salah satu negara tujuan narkoba hingga menyatakan negara sedang dalam gawat darurat (Aditya, 2017).

Tidak jauh berbeda dari Indonesia, Singapura yang perlunya melakukan kerjasama dengan melibatkan aparat-aparat negara terutama yang berhubungan

dengan narkoba, Singapura juga meningkatkan respon tindakan yang harus dibuat sehingga kemungkinan pihak CNB mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktifitas-aktifitas kejahatan narkoba. Untuk mencegah aliran narkoba, CNB berusaha keras untuk bekerjasama dengan negara lain dengan pertukaran informasi, membentuk kerjasama gabungan dengan mitra internasional Singapura berharap narkoba tidak lagi masuk ke negaranya. Berikutnya, Singapura juga bekerjasama dengan otoritas imigrasi yakni ICA dan SPF agar lebih memperketat aturan masuk ke Singapura, CNB juga melakukan pemeriksaan di darat secara berkala. Singapura dengan tegas menyatakan tidak akan lengah dalam memberantas narkoba, begitupun CNB yang akan meningkatkan fasilitas deteksi narkoba, intelijen, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat agar Singapura terbebas dari narkoba (AIPA.com, 2023).